

ABSTRAK

Anggy Syafitra 2016/16046057. Puncak Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988. **Skripsi**. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2020.

Skripsi ini mengkaji tentang cara dan strategi Azwar Anas (1977-1988) dalam memimpin dan membangun daerah Provinsi Sumatera Barat di Era Orde Baru. Sentral permasalahannya adalah program Azwar Anas dalam membangun dan memimpin Sumatera Barat dalam membangun dan memimpin masyarakat Sumatera Barat yang dulu luluh lantak akibat trauma PRRI. Kajian ini dilatar belakangi oleh keadaan Provinsi Sumatera Barat yang tahun 1960-an daerah ini terjadi pergolakan dan masyarakat merasakan trauma akibat peristiwa tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah memberikan gambaran tentang kondisi Sumatera Barat sebelum Azwar Anas menjabat, cara Gubernur Azwar Anas membangun dan memimpin Sumatera barat, serta dampaknya bagi masyarakat Sumatera Barat.

Skripsi ini memakai metode penelitian kualitatif, jenis penelitian sejarah. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang dilakukan melalui tahap heuristic, kritik sumber, analisa dan interpretasi, terakhir dilaporkan dalam bentuk skripsi.

Dari hasil temuan penulis dalam rangka membangun dan memimpin masyarakat Sumatera Barat yang jatuh setelah pergolakan, Azwar Anas menyusun pola dasar pembangunan Sumatera Barat. Azwar Anas melakukan reorganisasi pemerintahan daerah dengan mengangkat tiga pembantu Gubernur dan jorong dijadikan desa. Pembangunan desa di Sumatera Barat dilakukan dengan cara terpadu dengan sistem gotong royong yang mana partisipasi masyarakat dibutuhkan. Sumatera Barat menjadi pelaksana MTQ Nasional XIII merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat, dan dibuatnya acara tahunan yang sangat penting bagi kultural Minangkabau yaitu Pekan Budaya. Kondisi puncak Sumatera Barat mendapatkan kebanggaan dan harga diri yang terangkatkan ialah menjadi satu-satunya provinsi di luar pulau Jawa yang menerima penghargaan provinsi terbaik dalam pelaksanaan pembangunan dengan menerima Piagam Parasamya Purnakarya Nugraha. Hal tersebut merupakan moment resmi berakhirnya secara definitif proses pasifikasi masyarakat Sumatera Barat pasca-PRRI dan terbukanya era baru bagi Provinsi Sumatera Barat untuk memulai masa depan yang cerah dalam segala aspek.

Kata kunci: *Pembangunan, Orde Baru, pemimpin, kebijakan.*